

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam dan memiliki budaya yang beragam, termasuk tradisi, seni, bahasa, dan agama yang menjadi ciri khas serta daya tarik baik di tingkat lokal maupun internasional. Potensi ini dapat dimaksimalkan melalui industri pariwisata yang tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkenalkan sekaligus melindungi kekayaan alam dan budaya (Pane, 2022).

Tujuan dari pengembangan pariwisata adalah untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan daya tarik wisata yang meliputi keindahan alam, keanekaragaman flora dan fauna, tradisi, seni budaya, dan warisan sejarah sebagai aset berharga untuk meningkatkan daya tarik suatu daerah. Selain itu, jika dikelola dengan baik, pariwisata dapat berfungsi sebagai penghubung untuk mempromosikan potensi Indonesia dan melestarikan sumber daya alam serta budaya yang ada (Winingsih, 2022).

Provinsi Jambi sendiri memiliki beberapa tempat wisata yang dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat, salah satunya adalah objek wisata Gentala Arasy. Gentala Arasy merupakan salah satu objek wisata yang merupakan museum budaya bercorak arsitektur Arab yang terdapat di Provinsi Jambi, di tepi Sungai Batanghari. Selain museum dan ruang terbuka publik, bagian belakang museum ini terhubung dengan daerah seberang sungai, dengan adanya jembatan pedestrian selebar 4,5 meter, panjang 503 meter dan memiliki tinggi yang mencapai 80 meter (Pane, 2022)

Di puncak menara museum ini, terdapat jam besar yang bisa dilihat dari kejauhan. Nama “Gentala Arasy” adalah gabungan dari dua kata yaitu, Genta dan Tala. Genta merupakan alat bunyian yang terbuat dari logam, adapun Tala adalah penelarar nada, sedangkan Arasy merujuk pada makna “tahta tertinggi”. Maka dari itu Gentala Arasy terangkai menjadi kata indah yang dimaknai bunyi panduan yang menyelaraskan waktu di mana umat harus menunduk dan bersujud kepada Allah. Namun Gentala Arasy juga bermakna “Genah Tanah Lahir Abdurahman Sayoeti” yaitu nama mantan Gubernur Jambi yang memang lahir di daerah seberang (Pane, 2022).

Jembatan Gentala Arasy memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Yang mana jembatan ini berperan sebagai tempat umum untuk bersantai, berolahraga, dan bersosialisasi, serta menjadi lambang kebanggaan masyarakat Jambi dengan nilai sejarah dan budaya yang besar. Selain itu, jembatan ini juga memudahkan pergerakan antar wilayah di tepi Sungai Batanghari dan menyediakan pilihan transportasi lain bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda, sehingga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Bagus Rahmat Nugroho, 2024).

Namun, aktivitas kehadiran pedagang kaki lima (PKL) di destinasi wisata seringkali menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari. Seperti yang kita ketahui, Pedagang kaki lima mempunyai peranan penting dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, terutama dalam menyediakan kebutuhan wisata seperti makanan, minuman dan cinderamata (Pratiningsih et al., 2021) . Namun, bukan

berarti manfaat dari jembatan gentala arasy ini bisa di salahgunakan oleh PKL yang berjualan tidak sesuai pada tempat peruntukannya.

Pada kenyataannya keberadaan PKL berdampak pada dua sisi. Di satu sisi, memberikan kesempatan bagi para pedagang untuk meningkatkan bisnis atau kebutuhan mereka secara ekonomi, namun di sisi lain PKL melanggar peraturan dengan berjualan di area yang mengganggu aktivitas dan merugikan publik, seperti berjualan di bahu jalan yang mengganggu pengguna transportasi dan merusak tata ruang kota (Simarmata, 2023). Pedagang kaki lima sering dianggap melanggar aturan karena mereka menggunakan ruang publik secara tidak resmi dan bertentangan dengan tujuan kota yang mengutamakan kebersihan, keteraturan, serta estetika lingkungan.

Pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang publik seperti jembatan, trotoar, dan bahu jalan di area wisata sering kali menjadi sumber masalah. Kehadiran mereka tidak hanya menyebabkan kekacauan yang mengganggu pergerakan wisatawan, tetapi juga merusak keindahan, estetika, kerapihan, dan keteraturan daerah wisata. Situasi ini menciptakan ketidaknyamanan bagi pengunjung, dan bertentangan dengan inisiatif pemerintah untuk menciptakan lingkungan wisata yang bersih, teratur, dan menarik. Jika dibiarkan tanpa pengelolaan yang baik, keadaan ini dapat berdampak negatif pada citra daerah wisata dan berpotensi menurunkan citra dari objek wisata tersebut (Baidawi et al., 2024).

Permasalahan PKL ini juga terjadi di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu provinsi Jambi terkhusus pada objek wisata Gentala Arasy. Keberadaan PKL yang

tumbuh terus menerus muncul menempati pelataran masuk jembatan gentala arasy bahkan sampai di tengah jembatan yang mengganggu kelancaran dalam beraktivitas di area jembatan serta kenyamanan pengguna jembatan dan area sekitarnya (Fatriani et al., 2024).

Fenomena yang terjadi di area sekitar objek wisata Gentala Arasy adanya pelanggaran tata ruang dan wilayah yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima dengan beragam lapak, meja, kursi dan berbagai alat lainnya dalam kegiatan usaha mereka ditinggalkan berada di sekitar wilayah objek wisata Gentala Arasy sehingga merusak pemandangan estetika tata ruang publik di area objek wisata Gentala Arasy (Pane, 2022).

Dilansir dari berita Kompas TV Jambi, Maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jembatan Gentala Arasy di Kota Jambi membuat lokasi jembatan semraut, pengunjung untuk masuk ke dalam lokasi untuk berwisata terganggu lantaran banyaknya pedagang yang berjualan di pintu masuk jembatan Gentala. Apabila ditemukan pedagang yang membandel dan berjualan di lokasi akan diberikan sanksi tegas berupa denda (K. Jambi, 2021).

Pernyataan di atas menyatakan bahwa kehadiran pedagang kaki lima di area Jembatan Gentala Arasy, Kota Jambi, telah menimbulkan ketidakrapihan di seputar tempat wisata. Jumlah pedagang yang ada di pintu masuk jembatan mengganggu kenyamanan pengunjung yang ingin masuk ke zona wisata. Sebagai tindakan penertiban, pemerintah memberikan peringatan dan menerapkan sanksi yang ketat berupa denda bagi pedagang yang masih berjualan di zona terlarang. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mempertahankan kebersihan, keteraturan, dan kenyamanan lokasi wisata tersebut.

Dalam penertiban PKL juga memerlukan peran pemerintah terkait permasalahan ini. Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan peraturan daerah Kota Jambi Nomor 12 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Pada pasal 28 huruf (a) menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima dilarang berjualan di tempat umum yang tidak diperbolehkan untuk lokasi berdagang. Dilihat pada permasalahan yang ada, Masih banyak PKL di kota jambi khususnya di kawasan objek wisata Gentala Arasy Kota Jambi yang melakukan aktivitas berdagang tidak sesuai dengan peraturan daerah (perda) tersebut. PKL yang berjualan di pelataran masuk gentala arasy hingga di jembatan gentala arasy yang sudah jelas bahwa hal tersebut dilarang. Dengan demikian PKL telah melanggar Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Jambi (Hindriyani, 2023).

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi tersebut, pada tahun 2021 telah dilakukan penertiban, relokasi dan sosialisasi terhadap permasalahan PKL yang ada di objek wisata Gentala Arasy ini. Namun faktanya strategi yang telah di keluarkan oleh pemerintah tersebut tidak berjalan optimal dan tidak menjadi solusi yang baik untuk permasalahan ini.

Dilansir dari laman berita tribun jambi, “terlihat pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi. Pedagang kaki lima dialihkan berjualan di bawah Jembatan Gentala Arasy (Azzahro, 2021).”

Permasalahan diatas, menjadi timbulnya masalah publik lainnya yang harus menjadi perhatian khusus untuk pemerintah. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Satpol PP Provinsi jambi selaku pemerintah yang berwenang untuk melakukan

penertiban dan menegakkan peraturan daerah serta pemerintah lainnya terkait dalam berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, seharusnya memberikan solusi yang konkrit dari persoalan PKL yang tak kunjung selesai sampai saat ini, dengan saling berkoordinasi satu sama lain.

Dilansir dari laman berita lamanesia.com, dikatakan oleh asisten III pemkot Jambi, “Kita sudah sering lakukan sosialisasi bersama pedagang, dari tingkat Kelurahan dan kecamatan. Solusi kita kali ini, akan menata kembali supaya kedepannya terlihat tertib dan rapi (Admin, 2021),”.

Pernyataan di atas mengutip pernyataan dari asisten III pemkot Jambi, dapat dikatakan bahwa sosialisasi sudah pernah dilakukan bersama pedagang, dari tingkat kelurahan maupun kecamatan dalam strategi pemerintah untuk mengatasi permasalahan PKL ini. Namun nyatanya solusi tersebut belum berjalan optimal yang mana sekarang di tahun 2024 masih banyak PKL yang masih melanggar peraturan yang berlaku terkait tempat peruntukan PKL.

“Dilansir dari laman berita jambi antara news, satpol PP Provinsi Jambi melakukan penertiban di kawasan tersebut yang merupakan bagian dari penataan dan peningkatan kualitas destinasi wisata tersebut (Abdullah, 2021).”

Penertiban oleh Satpol PP Provinsi Jambi di area tersebut mencerminkan usaha pemerintah untuk merapikan dan meningkatkan mutu tempat wisata agar lebih nyaman, teratur, dan menarik bagi pengunjung. Tindakan ini sangat penting untuk menciptakan suasana wisata yang bersih dan terencana, yang pada gilirannya dapat menarik perhatian kawasan itu. Namun, agar penertiban ini berjalan dengan baik dan tidak menyebabkan perselisihan, diperlukan pendekatan yang bersifat manusiawi, termasuk memberikan solusi alternatif bagi pihak-pihak yang

terpengaruh, seperti pedagang kaki lima. Penataan ini juga seharusnya disertai dengan sosialisasi yang efisien agar semua pihak mengerti tujuan jangka panjangnya, yaitu untuk meningkatkan potensi pariwisata Jambi sebagai destinasi unggulan.

Relokasi, sosialisasi, dan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam menangani masalah pedagang kaki lima di objek wisata Gentala Arasy adalah untuk menciptakan kawasan wisata yang tertib, nyaman, dan menarik bagi pengunjung. Langkah ini bertujuan menjaga keindahan, keestetikan, dan keteraturan lingkungan wisata, sehingga dapat meningkatkan daya tarik kawasan tersebut sebagai destinasi unggulan. Relokasi, sosialisasi, dan penertiban dilakukan untuk menyediakan lokasi yang lebih terorganisasi bagi pedagang kaki lima, menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi mereka, tata ruang, dan kenyamanan wisatawan (Riri Maria Fatriani, 2024).

Pada penelitian ini, penulis merujuk pada 6 studi sebelumnya yang membahas tentang pedagang kaki lima. Studi-studi sebelumnya ini dipakai untuk memberikan fokus pada masalah tertentu dalam penelitian ini dan membantu dalam memetakan posisi penelitian. Selain itu, hal ini juga berfungsi sebagai referensi untuk menyajikan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan penelitian yang telah ada.

Penelitian pertama oleh (Anugrah, 2024) Penelitian mengenai **Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tradisional Kota Jambi di Pasar Aur Duri** menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil meningkatkan kerapian dan keteraturan pasar. Namun, tantangan seperti penolakan

dari beberapa pedagang dan penurunan pendapatan bagi sejumlah PKL masih menjadi isu yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan pedagang diperlukan agar relokasi dapat dianggap sepenuhnya efektif.

Penelitian kedua oleh (Fitri S Kasim & Selviyana R Manan, 2022), Penelitian mengenai **Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli** menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menegakkan ketertiban di pasar. Kebijakan ini mencakup penetapan aturan tentang tempat dan waktu berjualan, serta usaha sosialisasi dan pembinaan untuk para pedagang. Pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga dilakukan guna menegakkan peraturan, meskipun ada tantangan seperti kurangnya komunikasi antara pemerintah dan PKL serta minimnya fasilitas pendukung. Untuk meningkatkan efektivitas strategi, disarankan agar pemerintah memperbarui komunikasi dan menyediakan infrastruktur yang memadai, sehingga penertiban dan penataan PKL dapat dilakukan lebih baik dan berkelanjutan.

Penelitian ketiga oleh (Pane, 2022), Penelitian mengenai **Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima terkait Penyalahgunaan Ruang Publik di Area Objek Wisata Gentala Arasy di Kota Jambi** menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan pencegahan dan penindakan. Pendekatan pencegahan mencakup sosialisasi dan pembinaan bagi pedagang kaki lima (PKL) agar memahami aturan, sedangkan tindakan penindakan melibatkan razia untuk menertibkan pelanggaran. Walaupun ada usaha dari pemerintah,

masalah seperti kurangnya kolaborasi antar lembaga dan rendahnya pemahaman PKL tentang regulasi menghambat efektivitas penegakan hukum. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga mempengaruhi keberadaan PKL di area wisata. Oleh sebab itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan komunikasi dengan PKL dan menyediakan alternatif lokasi berjualan yang lebih baik untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum.

Penelitian keempat oleh (Hindriyani, 2023) penelitian mengenai **Strategi Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Talang Kota Jambi Provinsi Jambi** menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan tindakan seperti pembangunan pasar modern dan penertiban secara rutin untuk mengelola keberadaan PKL. Walaupun ada usaha tersebut, masalah seperti penolakan dari pedagang dan kurangnya fasilitas di lokasi baru tetap menjadi kendala bagi efektivitas strategi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih bersama antara pemerintah dan PKL untuk mencapai pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Penelitian kelima oleh (Luthfi Faisal Natsir, Lim Nabilah, 2024) penelitian tentang **Upaya Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu** menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 sebagai dasar dalam pengaturan dan pemberdayaan PKL. Inisiatif ini mencakup penyediaan tujuh lokasi baru untuk berjualan, seperti di pusat olahraga dan pasar mambo, yang bertujuan untuk mengatur kehadiran PKL agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Meskipun telah ada kemajuan dalam pengaturan, tantangan seperti

kurangnya sosialisasi dan dukungan dari para pedagang masih harus diatasi agar penerapan kebijakan dapat lebih efektif.

Penelitian keenam oleh (Rosyidi, 2020) penelitian tentang **Implementation Of Arrangement And Guidance Policy For Street Vendors Policy: Improving Advantage Of Profits** membahas kebijakan dan pembinaan untuk pedagang kaki lima (PKL) dan bagaimana hal itu mempengaruhi keuntungan mereka. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang terencana dapat membantu PKL beroperasi lebih efisien, meningkatkan penghasilan, dan memberikan kontribusi bagi perekonomian lokal. Melalui metode kualitatif, penulis menemukan bahwa dukungan dari pemerintah, seperti pelatihan dan infrastruktur yang cukup, sangat penting untuk keberhasilan PKL. Secara keseluruhan, artikel ini menekankan pentingnya kebijakan yang tepat dalam memberdayakan PKL dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Penelitian sebelumnya di atas menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti ini belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya memiliki topik yang sama, yaitu Penataan dan Penertiban PKL. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah lokasi dan teori yang digunakan, yaitu peneliti akan meneliti di objek wisata Gentala Arasy dengan menggunakan teori strategi menurut Geoff Mulgan (2009) sehingga akan menghasilkan hasil temuan yang berbeda pula.

Pemerintah Provinsi Jambi harus memiliki strategi dalam mengatasi permasalahan PKL ini dalam penertibannya, terkhususnya di objek wisata Gentala Arasy Kota Jambi, karena tempat ini merupakan jembatan tempat pedestrian yang

sudah jelas dilarang bagi PKL untuk berjualan apalagi sampai membuka lapak berjualan, hal ini sudah jelas di atur dalam peraturan daerah No 12 tahun 2016 tentang penataan dan penertiban PKL dan masih ada Peraturan-peraturan Daerah lainnya yang membahas mengenai tempat dan waktu berjualan bagi PKL. Jika PKL ini masih berjualan di tempat yang tidak pada peruntukannya ini, maka dapat menyebabkan kesemrawutan, ketidak rapihan, merusak keindahan, keestetikan dan mengganggu wisatawan serta merusak kenyamanan wisatawan dalam berkunjung ke objek wisata tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi harus bertanggung jawab terkait masalah penertiban PKL ini. Sehingga penulis berencana ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Strategi Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Hasil penelitian ini akan disajikan dalam tulisan yang berjudul "**Strategi Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Objek Wisata Gentala Arasy Kota Jambi**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan pemerintah Provinsi jambi dalam penertiban PKL di Objek Wisata Gentala Arasy?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah provinsi jambi dalam penertiban PKL di Objek Wisata Gentala Arasy?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi yang diterapkan pemerintah Provinsi Jambi dalam penertiban PKL di Objek Wisata Gentala Arasy
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah Provinsi Jambi dalam penertiban PKL di Objek Wisata Gentala Arasy

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman, terutama mengenai penertiban PKL di Objek Wisata Gentala Arasy Kota Jambi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dari penulis untuk pemerintah dalam penertiban PKL di Objek Wisata Gentala Arasy Kota Jambi.

1.5 Landasan Teori

Teori ini akan memberikan panduan dan arahan bagi peneliti untuk melakukan analisis topik yang diangkat serta membantu dalam menemukan sumber masalah di lapangan. Teori ini juga akan mendefinisikan indikator dan melakukan identifikasi atau analisis, serta sebagai alat untuk memecahkan masalah di lapangan

sesuai dengan takaran variabel topik penelitian. Berikut adalah teori yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah di lapangan.

1.5.1 Teori Strategi Pemerintah

Marrus mengatakan bahwa strategi didefinisikan sebagai proses menentukan inisiatif mana yang harus diprioritaskan oleh para pemimpin puncak perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya, serta pembuatan strategi atau metode untuk mencapainya. Quinn juga mengatakan bahwa strategi adalah bentuk atau rencana yang menyatukan tujuan organisasi, kebijakan, dan berbagai tindakan. Strategi yang direncanakan dengan baik akan membantu merencanakan dan mengalokasikan sumber daya untuk sesuatu yang permanen dan unik (Pratiwi, 2024).

Chandler menjelaskan bahwa strategi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam hal prioritas alokasi sumber daya, tujuan jangka panjang, dan program tindak lanjut. Namun, menurut Argyris, Steiner dan Miner mengatakan bahwa strategi adalah reaksi terus-menerus dan adaptif terhadap terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal (Wariska, 2023).

Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan (2009) sendiri lebih berbicaara mengenai strategi yang diperuntukan untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik (Mulgan, 2009:19) dalam (Ramadani, 2022).

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, Secara keseluruhan, strategi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan jangka panjang yang berubah seiring dengan lingkungan atau tantangan, dengan fokus pada alokasi sumber daya yang tepat untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien serta bertujuan untuk kepentingan publik.

Peneliti memilih teori yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan dalam penelitiannya karena sangat relevan dengan penelitian ini, yang mana teori ini menawarkan kerangka yang terstruktur untuk menganalisis strategi pemerintah Provinsi Jambi dalam penataan dan penertiban PKL. Dengan lima indikator tersebut mencakup semua aspek penting, dimulai dari penetapan tujuan yang jelas, penilaian perubahan lingkungan, pengarahannya yang efisien, pelaksanaan tindakan nyata, hingga pembelajaran untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai seberapa efektif strategi pemerintah dalam mewujudkan kawasan wisata Gentala Arasy yang lebih teratur dan berkelanjutan, sembari memperhatikan kepentingan para PKL.

Berdasarkan penjelasan di atas, Geoff Mulgan (2009), menguraikan strategi pemerintah ke dalam lima indikator yaitu: Tujuan (*Purpose*); Lingkungan (*Environment*); Arahan (*Direction*); Tindakan (*Action*); dan Pembelajaran (*Learning*). Kelima komponen tersebut memiliki unsur yang saling terkait satu sama lain, sehingga dapat menghasilkan suatu kebijakan maupun menjalankan kepentingan pemerintahan yang lebih efektif (Wariska, 2023).

Mulgan menilai bahwa kekuasaan (*Power*) dan ilmu pengetahuan (*Knowledge*) sebagai sumber daya utama yang diperlukan dalam proses desain dan proses implementasinya. Kedua hal tersebut yang menjadi alasan peneliti untuk menggunakan teori dan indikator yang disampaikan Geoff Mulgan, dimana kelima indikator dalam teori yang dijelaskan cocok digunakan untuk melihat strategi pemerintah dalam penataan dan penertiban PKL di objek wisata gentala asrasy kota jambi. Berikut penjelasan yang lebih dalam terkait lima indikator yang disampaikan oleh Geoff Mulgan (2009) (Wariska, 2023):

1. Tujuan (*Purposes*),

Melihat teori dari konsep masyarakat Jepang tentang tujuan itu sendiri, yang disebut *Ikigai* (konsep masyarakat Jepang yang berarti sebuah alasan untuk tujuan). Dimana indikator *Ikigai* adalah *Mission* (misi) dan *Passion/Vocation* (bakat/kemampuan). Dari indikator konsep masyarakat Jepang tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk memiliki sebuah tujuan dibutuhkan misi dan kemampuan untuk menjalankan dan mengimplementasikan misi tersebut.

Menurut Geoff Mulgan, tujuan dalam strategi adalah dasar bagi organisasi atau pemerintahan dalam mencapai keberhasilan. Tujuan berfungsi sebagai alat pengukur keberhasilan suatu strategi dan memastikan setiap tindakan dan keputusan selaras dengan visi yang ingin dicapai. Dengan menetapkan tujuan yang terukur dan dapat dievaluasi, organisasi atau pemerintahan dapat memantau kemajuan yang telah dicapai dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Tanpa tujuan yang jelas, organisasi akan kehilangan fokus dan sumber daya yang ada akan terbuang sia-sia

tanpa hasil yang signifikan. Oleh karena itu, penetapan tujuan yang tepat menjadi langkah krusial dalam perencanaan strategis.

Indikator dari tujuan adalah misi dan bakat/kemampuan. Tujuan harus menjadi misi yang menginspirasi seluruh anggota organisasi dan masyarakat. Dengan memiliki misi dan kemampuan, setiap individu akan merasa termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Sehingga menciptakan sinergi yang kuat dalam mencapai tujuan bersama. Dalam proses mencapai tujuan, organisasi atau pemerintahan seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan dan sumber daya yang terbatas. Disinilah tujuan berperan sebagai penentu prioritas. Dengan memahami tujuan yang ingin dicapai organisasi dapat memfokuskan sumber daya pada kegiatan yang paling efektif dan efisien. Prioritisasi yang tepat akan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal dan memaksimalkan dampak positif yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini berfokus melihat tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Jambi dalam menangani permasalahan PKL di Gentala Arasy ini melalui strategi yang di terapkannya dalam hal penertiban.

2. Lingkungan (*Environment*),

Indikator dari lingkungan dapat diukur dengan perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar (*change in ambition condition*). Menurut Geoff Mulgan Strategi harus mempertimbangkan kondisi terkini serta kebijakan atau tindakan kedepan untuk memastikan strategi yang ditetapkan relevan dan dapat dicapai untuk jangka panjang. Dengan kata lain, strategi harus disesuaikan dengan lingkungan saat ini dan perkiraan perubahan di masa mendatang. Organisasi

harus benar-benar paham situasi sekarang dan perkiraan di masa depan sebelum menentukan strategi. Pada strategi indikator lingkungan dapat dianalisis dengan faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan tantangan serta faktor internal yang terdiri dari kelemahan dan kekurangan yang mempengaruhi strategi suatu organisasi.

Indikator dari lingkungan dapat diukur dari perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar. Oleh karena itu, dalam merencanakan strategi untuk kepentingan masyarakat, pemerintah perlu cermat mengamati perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan ini dapat berpengaruh pada kemampuan pemerintah dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan memahami kondisi lingkungan secara menyeluruh, pemerintah dapat lebih tanggap terhadap perubahan dan mengambil keputusan yang lebih akurat dan efektif.

Dalam penelitian ini berfokus dalam hal memahami situasi yang ada ataupun melihat perubahan lingkungan yang terjadi dengan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah provinsi jambi dalam menata dan menertibkan PKL di Gentala Arasy. Hal ini Agar strategi yang ingin diterapkan selanjutnya lebih efektif dan berkelanjutan agar berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Pengarahan (Direction),

Terdapat empat indikator pengarah atau directions pada bagian ini, diantaranya adalah koordinasi (coordination), motivasi (motivation), komunikasi (communication), dan perintah (command). Keempat indikator ini akan menjadi acuan dari sebuah pengarah (Directions). Geoff Mulgan

mengatakan pengarahannya menjadi tahapan penting dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil setelah tujuan ditetapkan dan lingkungan dipahami. Tahap ini melibatkan penyusunan rencana aksi yang terstruktur dan jelas, yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan potensi hambatan. Dengan demikian, indikator ini memastikan adanya panduan yang terarah dan terkoordinasi dalam upaya mencapai tujuan publik yang diinginkan. Mulgan juga mendefinisikan tujuan dan hasil yang ingin dicapai sebagai sesuatu yang membutuhkan arahan atau perintah. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya komando atau instruksi yang jelas.

Ada empat indikator dalam pengarahannya diantaranya koordinasi, motivasi, komunikasi, dan perintah. Koordinasi memastikan seluruh sumber daya dan elemen bekerja selaras dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang terbuka dan jelas sangat penting agar setiap individu memahami tujuan, strategi, dan peran masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Motivasi memberikan semangat dan dukungan kepada seluruh anggota tim, menjaga komitmen dan antusiasme dalam melaksanakan tugas. Pengarahannya langsung melibatkan pemberian instruksi dan bimbingan yang jelas kepada tim, memastikan pemahaman yang baik tentang harapan dan cara mencapai hasil yang diinginkan.

Sebagai kesimpulan, indikator pengarahannya dalam strategi pemerintahan menurut Geoff Mulgan menekankan pentingnya memastikan adanya arah yang jelas dan terkoordinasi dalam upaya mencapai tujuan publik. Ini melibatkan

penyusunan rencana aksi yang terstruktur, koordinasi sumber daya, komunikasi yang efektif, motivasi tim, serta pengarahan yang jelas. Dengan pengarahan yang baik, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya publik secara efisien, memantau kemajuan, dan terus meningkatkan efektivitas strategi yang dijalankan.

Dalam penelitian ini berfokus melihat langkah-langkah spesifik yang diambil pemerintah provinsi jambi melalui koordinasi, komunikasi, motivasi, dan perintah untuk mencapai tujuan. Hal ini melibatkan identifikasi dan analisis tindakan, kebijakan dan program dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan estetis di Gentala Arasy.

4. Tindakan (*Action*),

Terdapat tiga indikator penting pada bagian ini diantaranya : situasi eksternal (*external situation*); perangkat (*device*); dan pengambil keputusan (*decision making*). Ketiga hal ini saling terkait erat pada saat akan melakukan tindakan. Geoff Mulgan menekankan bahwa tindakan yang efektif harus terperinci, didukung oleh kebijakan hukum yang kuat dan memiliki kepemimpinan yang mampu meyakinkan serta mendorong orang untuk berkomitmen dan berpartisipasi aktif. Indikator ini secara garis besar membahas bagaimana pemerintah benar-benar menjalankan strategi mereka di lapangan. Pada bagian ini terdapat tiga indikator, yaitu situasi eksternal, perangkat yang digunakan, dan pengambilan keputusan. Ketiga aspek ini memiliki hubungan yang erat ketika akan melaksanakan suatu tindakan.

Situasi eksternal mengacu pada pemahaman mendalam tentang kondisi masyarakat dan lingkungan tempat strategi tersebut diimplementasikan. Perangkat yang digunakan, Indikator ini merujuk pada sumber daya dan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan strategi. Ini mencakup alokasi anggaran, penggunaan teknologi, serta pemanfaatan sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia. Pemilihan perangkat yang tepat dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan. Terakhir pengambilan keputusan, Indikator ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang rasional dan transparan dalam setiap tahap implementasi strategi. Pemerintah perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk mengumpulkan informasi, menganalisis opsi yang tersedia, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti dan pertimbangan yang matang.

Dalam penelitian ini berfokus pada melihat langkah-langkah konkret dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jambi dalam menertibkan PKL di Gentala Arasy. Seperti ingin melihat tindakan apa saja yang telah diambil, seberapa efektif tindakan tersebut, dan dampak dari tindakan tersebut bagi PKL, masyarakat atau wisatawan dan citra wisata tersebut.

5. Pembelajaran (learning),

Pada indikator ini terdapat dua variabel penting yaitu, metode perbandingan (*compration method*) dan identifikasi (*identification*). Geoff Mulgan mendefinisikan pembelajaran sebagai proses menganalisis tindakan yang telah dilakukan untuk menentukan efektivitasnya, serta mengevaluasi

kembali tujuan, analisis situasi, dan arah strategi yang telah dipilih. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi yang perlu diperbaiki dan memastikan strategi tetap relevan dan efektif. Pada pembelajaran terdapat dua indikator penting, yaitu metode perbandingan dan identifikasi. Metode perbandingan melibatkan perbandingan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Proses ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi di bagian mana kinerja mereka masih kurang optimal dan belajar dari praktik yang telah dilakukan. Perbandingan ini tidak hanya terbatas pada angka-angka, tetapi juga mencakup proses, kebijakan, dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.

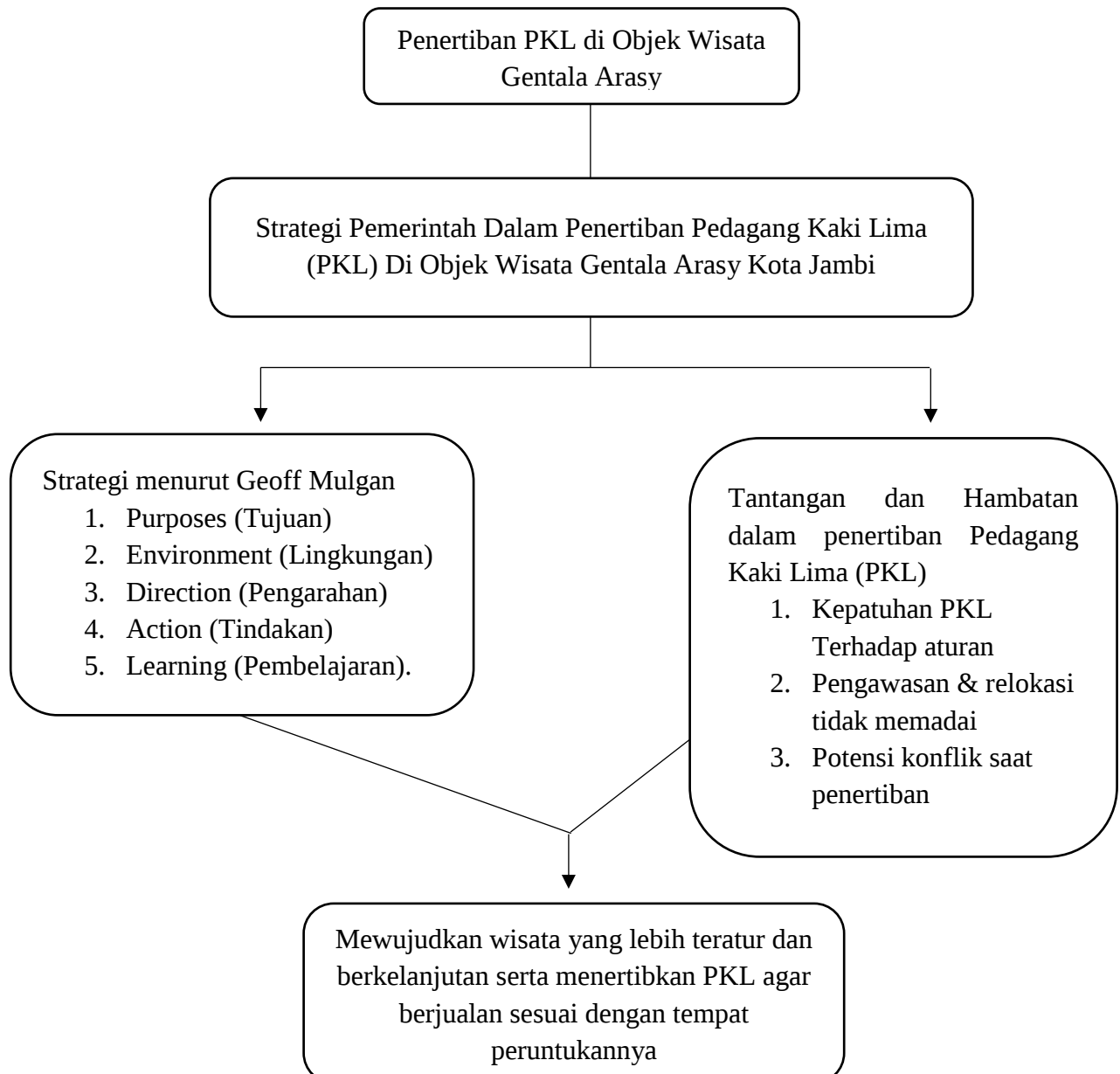
Indikator identifikasi berfokus pada kemampuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu tindakan. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap data, umpan balik dari pemangku kepentingan, dan evaluasi dampak yang dihasilkan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, pemerintah dapat menyesuaikan strategi mereka agar lebih efektif di masa depan dan menghindari kesalahan yang sama. Proses identifikasi ini membutuhkan pemikiran kritis, kreativitas, dan kemauan untuk mengakui dan belajar dari kesalahan.

Dalam penelitian ini berfokus pada melihat bagaimana pemerintah provinsi jambi mengevaluasi kebijakan sebelumnya agar bisa melakukan perbandingan, inovasi, dan perbaikan dalam menertibkan PKL di Gentala Arasy.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian merupakan landasan pemikiran yang digunakan dalam suatu penelitian yang berakar pada fakta, data, dan ulasan literatur yang mencakup teori atau argumen serta konsep yang mendasari penelitian. Kerangka berpikir juga dapat diartikan sebagai serangkaian yang menggambarkan hubungan antara teori dan berbagai unsur yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang perlu diteliti.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Pada kerangka berpikir di atas peneliti ingin melihat bagaimana strategi yang diterapkan oleh pemerintah provinsi Jambi dalam menangani permasalahan PKL di Gentala Arasy dengan permasalahan dalam hal penertiban yang dilakukan. Selain itu juga peneliti ingin melihat apa saja tantangan serta hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jambi dalam melakukan penertiban PKL di Gentala Arasy. Yang mana permasalahan ini akan dianalisis menggunakan teori strategi dari Geoff Mulgan (2009) dengan 5 indikator nya yang mencakup aspek penting, mulai dari penetapan tujuan yang jelas, penilaian perubahan lingkungan, pengarahannya yang efisien, pelaksanaan tindakan nyata, hingga pembelajaran untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan output yang ingin dihasilkan yaitu, agar bisa mewujudkan kawasan wisata Gentala Arasy yang lebih teratur dan berkelanjutan, dan menertibkan PKL agar bisa berjalan sesuai pada tempat peruntukannya sembari memperhatikan kepentingan para PKL.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari metodologi kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara menyeluruh dan deskriptif dengan kata-kata dan bahasa secara alami. Dengan menggunakan metode alami, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik. (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2017).

Penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus merupakan bentuk penelitian yang menyelidiki suatu isu dalam batasan-batasan tertentu, mengumpulkan data secara menyeluruh, dan mengintegrasikan berbagai sumber informasi. Dengan penerapan metode ini, diharapkan peneliti mampu mengumpulkan data secara detail serta memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang strategi pemerintah dalam penertiban PKL di objek wisata gentala arasy.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada ruang publik objek wisata Gentala Arasy, yang merupakan salah satu ikon kota jambi dan kantor satpol PP Provinsi Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Untuk membatasi penelitian, penting untuk memiliki fokus penelitian yang jelas, memastikan bahwa penelitian tetap pada jalurnya dan tidak menyimpang dari pokok bahasan yang dimaksudkan dimana fokus penelitian ini pada tahun 2021-2024. Penelitian ini bertujuan untuk menilai strategi yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi dalam penertiban PKL di objek wisata Gentala Arasy.

1.7.4 Sumber Data

Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Provinsi jambi dalam penertiban PKL di objek wisata gentala arasy, maka diperlukan sumber data. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang didapat secara langsung saat di lapangan. Sumber data primer sangat diperlukan untuk mendukung temuan penelitian, karena data primer akan memberikan informasi yang akurat atau

sesungguhnya dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dalam Penelitian ini, menggunakan sumber data hasil wawancara dengan para narasumber.

b. Sumber Data sekunder

Informasi yang diperoleh dari sumber lain disebut sumber data sekunder. Sumber data sekunder dapat berupa dokumentasi berupa dokumen seperti kegiatan, foto, dan berita media yang berkaitan dengan topik penelitian. Misalnya, dokumen tentang rencana kerja atau rekap hasil kegiatan pertahun dalam melakukan penertiban PKL di objek wisata dan dokumen terkait lain.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian disebut informan (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2017). Untuk memilih informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposive, yang berarti mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sugioyono menyatakan bahwa teknik pengambilan sampel purposive digunakan karena peneliti memilih informan yang paling memahami apa yang diharapkan dari mereka atau mungkin bertindak sebagai penguasa, sehingga lebih mudah bagi peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Pratiwi, 2024).

Peneliti memilih beberapa informan yang relevan dengan subjek penelitian, seperti:

Tabel 1.1 Narasumber

No.	Narasumber	Alasan
1.	Satpol PP Provinsi Jambi yaitu Kepala Bidang Perundang-Undangan Daerah	Karena satpol PP bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah, termasuk dalam hal penertiban PKL, sehingga Satpol PP sangat memahami situasi PKL di lapangan.
2.	Pihak Kelurahan Pasar Jambi yaitu Sekretaris Lurah (Informan Tambahan)	Pihak kelurahan juga mempunyai wewenang dalam penataan PKL, karena PKL berada di wilayah kawasan kelurahan Kasang, pihak kelurahan juga mempunyai informasi mengenai wilayah yang ditempati PKL.
3.	Pihak Kecamatan Pasar Jambi yaitu Kasi Ketentraman dan Ketertiban (Informan Tambahan)	Pihak kecamatan juga mempunyai wewenang dalam penataan PKL, karena PKL berada di wilayah kawasan kecamatan Pasar Jambi, pihak kecamatan juga mempunyai informasi mengenai wilayah yang ditempati PKL.
4.	Pedagang Kaki Lima (PKL) (Informan Tambahan)	Karena PKL di sini yang mengetahui apa penyebab mereka tetap berjualan di tempat yang tidak semestinya dan PKL juga yang paham akan kebutuhan mereka.
5.	Masyarakat Umum/Wisatawan (Informan Tambahan)	Terdapat 4 informan masyarakat yang peneliti wawancara karena mereka yang merasakan dampak dari PKL ini, salah satu dampak nya seperti ketidakteraturan, kesemrawutan, serta merusak keestetikan dari objek wisata tersebut dan juga masyarakat sebagai pengamat PKL langsung serta sebagai partisipasi dalam mendukung relokasi ini.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, mereka tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dipakai untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dan selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan hasil penelitian. Ada berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode paling umum untuk mengumpulkan data kualitatif dalam penelitian. Menurut Bog dan Biklen, wawancara adalah dialog antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau penjelasan yang diarahkan oleh salah satu pihak (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2017). Tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan data yang mendalam mengenai suatu topik atau masalah yang diangkat selama proses penelitian. Dengan kata lain, wawancara adalah metode untuk memverifikasi data atau informasi yang telah diperoleh.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, yang memastikan bahwa peneliti akan mendapatkan informasi yang akurat jika mereka sudah mengetahuinya sebelumnya. Selain itu, wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mendapatkan pemikiran yang lebih terbuka tentang masalah yang dihadapi penelitian.

b. Dokumentasi

Pengumpulan dan pemeriksaan kembali dokumen terkait untuk mendapatkan informasi tentang topik penelitian ini disebut dokumentasi. Selain wawancara, informasi juga dapat diperoleh dengan melihat dokumen seperti buku harian, surat-surat, hasil rapat, arsip foto, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah penertiban PKL. Dokumen-dokumen ini menyediakan data yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian. (Rahardjo, 2011).

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu, meliputi dokumen rencana kerja atau rancangan strategi, laporan kegiatan pertahun dan foto-foto dokumentasi lapangan. Dokumen-dokumen ini merupakan sumber informasi vital untuk melakukan analisis terhadap permasalahan penertiban PKL di Gentala Arasy Kota Jambi.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yang berarti memberikan analisis sistematis dan faktual. Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan data deskriptif tentang perilaku dan kata-kata dari subjek penelitian secara tertulis dan lisan. Penelitian kualitatif bias sangat rumit dan tumpang tindih karena data yang dikumpulkan tidak hanya berfokus pada masalah yang telah ditentukan tetapi juga dapat berubah sesuai dengan keadaan lapangan (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2017). proses pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap:

1. Reduksi Data

Untuk mengurangi data atau merangkum informasi, hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil kesimpulan harus dirangkum atau diabstrakkan. Dengan kata lain, peneliti melakukan proses reduksi data secara konsisten selama proses penggalian data untuk menghasilkan catatan inti dari data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan memilih dan memilih data tentang penertiban PKL di objek wisata Gentala Arasy, lalu memfokuskan pada data yang berkaitan dengan strategi penertiban PKL oleh pemerintah Provinsi Jambi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tertata yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga diperlukan untuk menyederhanakannya tanpa mengurangi isi. Dengan demikian, data harus disajikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang dilengkapi dengan teks naratif, bagan, foto, atau gambar lainnya untuk menjelaskan bagaimana strategi pemerintah provinsi Jambi dalam penertiban PKL di objek wisata Gentala Arasy.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah bagian terakhir dari proses analisis data penelitian kualitatif. Seseorang dapat menarik kesimpulan dengan membandingkan pernyataan subjek penelitian dengan konsep-konsep dasar

yang terkandung dalam penelitian. Untuk menemukan jawaban tentang strategi pemerintah provinsi jambi dalam penertiban PKL di objek wisata gentala arasy, penelitian ini menarik kesimpulan dari berbagai hasil penelitian berdasarkan sumber data primer dan sekunder.

1.7.8 Keabsahan Data atau Triangulasi Data

Keabsahan Merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Keabsahan data menunjukkan validitas data dan informasi yang dihasilkan, yang menunjukkan bahwa semua data dan informasi telah dikumpulkan dengan teliti dan menghasilkan informasi yang akurat. Menurut Norman K. Denkin, triangulasi atau keabsahan data adalah proses mengkaji dengan menggunakan beberapa metode untuk melihat fenomena yang sama dari beberapa sudut pandang berbeda (Susanto et al., 2023). Keabsahan data juga mengukur derajat kepercayaan terhadap data penelitian yang telah diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk pengujian kebenaran data, ada 4 jenis triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber merupakan jenis triangulasi yang memanfaatkan berbagai sumber data berbeda dalam sebuah penelitian.
- b. Triangulasi Peneliti yaitu melibatkan beberapa peneliti dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda dalam satu penelitian.
- b. Triangulasi Metode yaitu meningkatkan keabsahan hasil penelitian dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan dan analisis data.

- c. Triangulasi Teori merupakan penggabungan teori atau perspektif yang berbeda untuk meningkatkan analisis data dan memperkuat hasil penelitian.

Berdasarkan beberapa triangulasi diatas, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data, melalui membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui metode kualitatif dengan menggunakan berbagai alat dan waktu yang berbeda.